

Fransiska Ervina Serlyana

by UNITRI Press

Submission date: 03-Jul-2023 08:52AM (UTC+0700)

Submission ID: 2002029930

File name: Fransiska_Ervina_Serlyana.docx (29.69K)

Word count: 1160

Character count: 8397

**EVALUASI PENERAPAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA
(SISKEUDES) DALAM MENINGKATKAN AKUNTABILITAS DAN
TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN DESA BEJI**

SKRIPSI

AKUNTANSI



Disusun Oleh :

FRANSISKA ERVINA SERLYANA

2019110216

10

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI

MALANG

2023

RINGKASAN

Untuk melaporkan penyelenggaraan pemerintahan desa, masyarakat harus menerima Laporan Realisasi APBDes dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes. Tujuan dari laporan ini adalah untuk mengevaluasi efisiensi operasional perangkat desa dan untuk membangun akuntabilitas dan transparansi dalam administrasi keuangan desa. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan, penelitian ini berupaya mengevaluasi kinerja Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Beji Kecamatan Junrejo Kota Batu. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Menurut temuan penelitian, Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dapat membantu Desa Beji Kecamatan Junrejo Kota Batu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan.

Kata Kunci: Penerapan Aplikasi Siskeudes, Akuntabilitas dan Transparansi

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah merupakan angin segar bagi pembangunan daerah di negara kita. Hal ini didukung oleh berbagai peraturan dan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang mengatur tentang fungsi desa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perundang-undangan memberikan pedoman dan landasan bagi masyarakat untuk tumbuh menjadi kota yang dinamis dan kompetitif. Agar desa-desa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat berjalan secara mandiri dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan, maka potensinya harus dikembangkan.

Desa, dari bawah ke atas, adalah semacam wilayah mandiri yang mampu mengelola sendiri persoalan domestiknya (Dewanti, 2015:1). Pemerintah desa, yang merupakan tingkatan pemerintahan terendah, bekerja sama erat dengan penduduk setempat dan membantu pemerintah pusat dalam memberikan pelayanan publik, mendorong pemberdayaan masyarakat, dan inisiatif terkait pembangunan lainnya. Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, kepala desa dan perangkat desa lainnya harus dapat berhasil melaksanakan tugasnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.

Tiga pilar akuntabilitas, keterbukaan, dan partisipasi dalam pengelolaan keuangan menjadi sorotan. Dalam hal ini pemerintah desa juga harus membuat laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB) dan Laporan

Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes yang merupakan salah satu cara pertanggungjawaban dan pengungkapan laporan keuangan desa. . dimanfaatkan oleh masyarakat desa untuk menilai kinerja kepala daerah dan menunjukkan akuntabilitas dan keterbukaan.

Manopo dan Arie (2016) berpendapat bahwa peningkatan kepercayaan publik dalam operasi pemerintah dapat dicapai melalui pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Untuk menjamin akuntabilitas dan keterbukaan dalam pelaporan keuangan, desa harus menerapkan pengelolaan keuangan. Laporan keuangan desa masih berada di urutan terbawah dalam hal realisme, akuntabilitas, dan keterbukaan.

Meningkatkan dukungan untuk kebijakan yang akan meningkatkan akurasi, transparansi, dan akuntabilitas pelaporan keuangan adalah fenomena yang merugikan kemampuan sektor publik Indonesia untuk berkembang (Risnainingsih et al., 2018). Mengadopsi paradigma otonomi berdampak pada perlunya memperhatikan akuntabilitas publik dan transparansi dalam politik dan administrasi, khususnya di sektor keuangan. Hal ini terkait dengan perkembangan pemerintahan desa yang menekankan pada tata kedaerahan dalam pemerintahan desa, dimana pemerintahan desa merupakan faktor dinamis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kewenangan masyarakat. Oleh karena itu, infrastruktur daerah masih banyak kekurangan, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan daerah (Ismail et al., 2016). Mengingat ketidakmampuan aparat desa dalam penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa, maka sangat

mungkin terjadi kesalahan baik administratif maupun substantif dalam pengelolaan uang desa yang dapat berujung pada permasalahan hukum (BPKP 2015).

Risnaningsih (2017) mendefinisikan manajemen keuangan sebagai manajemen yang berurusan dengan alokasi aset yang adil di berbagai sarana investasi serta upaya menghasilkan uang untuk investasi atau biaya yang masuk akal secara ekonomi. Inisiatif yang dapat dipertanggungjawabkan untuk perencanaan, penganggaran, pengelolaan pemerintahan desa, dan pelaporan keuangan adalah bagian dari pengelolaan keuangan desa. Tujuan utama dari sektor publik adalah pemenuhan akuntabilitas. Akuntabilitas sering dilihat sebagai tanggung jawab pengelola kepercayaan publik (pemerintah), yang bertugas menginformasikan publik tentang seberapa baik kinerja pemerintah dalam mencapai tujuannya melalui penggunaan akuntabilitas melalui laporan pelaksanaan rutin.

Melalui kegiatan evaluasi dalam proses perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan/penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan desa, dapat diketahui sejauh mana Pemerintah Desa telah berhasil memenuhi maksud dan tujuannya melayani masyarakat (Moedarlis, 2016). : 126). Karena kegiatan tersebut termasuk harapan dan keinginan masyarakat, masyarakat secara keseluruhan berhak mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan berjalan dan juga perlu mengetahui siapa yang bertugas merencanakan atau melaksanakan pengelolaan keuangan daerah (Halim: 126).

¹ Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang sebelumnya bernama SIMDA dikembangkan pada tahun 2015 sebagai hasil kerjasama antara pemerintah pusat dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Mempermudah perangkat desa untuk mengatur dan mengungkapkan keuangan mereka akan menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat.

Pengamatan menunjukkan bahwa perangkat lunak Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) telah diterapkan oleh pemerintah daerah, termasuk Desa Beji. Strategi ini dapat membantu pemerintah desa membuat laporan keuangan dengan lebih mudah. Pemerintah Desa memiliki banyak tanggung jawab karena kedudukannya yang penting. Akibatnya, sistem informasi dan komunikasi desa membantu masyarakat mengelola keuangan desa, sehingga sangat penting untuk memperhatikan bagaimana sistem keuangan desa digunakan.

Diharapkan dengan menerapkan ¹² sistem pengelolaan keuangan desa yang sehat, pemerintah desa akan lebih mampu mengelola operasionalnya secara mandiri, mencapai hasil yang diinginkan ⁸ dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, memberikan pelayanan terbaik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Peneliti tertarik untuk melakukan kajian implementasi Sistem Keuangan karena harus diterapkan di desa untuk mewujudkan pemerintahan desa yang bertanggung jawab.

“EVALUASI PENERAPAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DALAM MENINGKATKAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN DESA”.

1.2 Rumusan Masalah

Isu-isu di bawah ini dapat diangkat berdasarkan fakta-fakta di atas: Seberapa baik penggunaan ¹ sistem keuangan desa (Siskeudes) oleh Beji dalam meningkatkan akurasi dan keterbukaan laporan keuangan desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Peneliti harus mencapai tujuan berikut untuk memenuhi gambaran masalah penelitian: Seberapa besar peningkatan akuntabilitas dan keterbukaan laporan keuangan Desa Beji akibat penggunaan sistem keuangan desa (Siskeudes)?

1.4 Paradigma Penelitian

Menurut Lexy J. Moleong (2012), paradigma adalah pola atau model yang menggambarkan bagaimana sesuatu dibangun (komponen dan hubungannya) atau bagaimana potongan-potongan itu berfungsi (aktivitas yang memiliki konteks atau dimensi temporal tertentu). Sebaliknya, paradigma, menurut Kasiram (2008: 173), adalah kerangka studi yang fleksibel yang berfungsi sebagai seperangkat praduga, penegasan, aksioma, postulat, atau gagasan. Paradigma ilmiah dan paradigma alam adalah dua paradigma yang sering digunakan dalam kajian ilmiah. Harmon (Maleong: 2012:49) mendefinisikan paradigma sebagai model dasar persepsi, pemikiran, penilaian, dan tindakan sehubungan dengan aspek realitas tertentu.

Paradigma penelitian merupakan landasan bagi peneliti untuk membentuk kerangka berpikirnya saat melakukan penelitian pada topik penelitiannya, hal ini dapat disimpulkan berdasarkan pengetahuan tentang paradigma penelitian yang telah dikemukakan di atas. Pemanfaatan gagasan teoritis, metodologi, metode,

prosedur, dan tahapan analisis inilah yang kemudian akan diarahkan oleh penelitian agar berkelanjutan.

Peneliti menggunakan paradigma penelitian kualitatif berbasis konstruktivisme dalam kajiannya, menurut Meleong (2012: 50–51). Paradigma penelitian kualitatif sering dikaitkan dengan penelitian deskriptif analitis, komparatif, yang berfokus pada makna, di mana data dapat dikumpulkan melalui observasi dan analisis dokumen. Menurut pandangan dunia ini, realitas adalah apa yang diciptakan atau dibentuk oleh orang itu sendiri.

1.5 Manfaat Penelitian

Berikut kelebihan dari penelitian ini:

1. Bagi Peneliti

Pengguna Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) akan dapat memanfaatkan informasi yang diperoleh dari studi ini dengan cara yang sesuai dengan kewajiban peraturan.

2. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini harus memperdalam pengetahuan kita tentang topik dan memberikan sebagai sumber berharga untuk penyelidikan lebih lanjut.

3. Bagi Pemerintahan Desa beji

Pemerintah Desa Beji Kecamatan Junrejo Kota Batu dapat menggunakan hasil penelitian sebagai informasi dan masukan sekaligus memanfaatkan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

Fransiska Ervina Serlyana

ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX

13%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

| | | |
|---|---|----|
| 1 | riset.unisma.ac.id Internet Source | 5% |
| 2 | Submitted to Universitas Bengkulu Student Paper | 1% |
| 3 | docplayer.info Internet Source | 1% |
| 4 | jurnal.dpr.go.id Internet Source | 1% |
| 5 | library.um.ac.id Internet Source | 1% |
| 6 | repository.radenintan.ac.id Internet Source | 1% |
| 7 | Eko Sumarsono, Muh Effendi Purnomo. "EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DENGAN PENERAPAN SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI DANA DESA", Solusi, 2019 Publication | 1% |
| 8 | zombiedoc.com Internet Source | |

1 %

9

digilibadmin.unismuh.ac.id

Internet Source

1 %

10

rinjani.unitri.ac.id

Internet Source

1 %

11

digilib.iain-jember.ac.id

Internet Source

1 %

12

Djoko Suyono, Fajar Eko Agung Prakoso. "Implementasi Program Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Slawi Kulon Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal Tahun 2017", Indonesian Governance Journal : Kajian Politik-Pemerintahan, 2018

Publication

1 %

13

Irwandi Irwandi, Andrizal Andrizal, Suhermi Suhermi. "Urgensi Aplikasi Sistem Keuangan Desa Dalam Pengelolaan Administrasi Keuangan Di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat", Jurnal Sains Sosio Humaniora, 2020

Publication

1 %

Exclude bibliography On

Fransiska Ervina Serlyana

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8
